



Akhlaq Islami dan Hukum: Pilar Utama dalam Membangun Masyarakat Madani

Ahmad Yudianto¹, Septi Ayu Wulandari²

^{1,2} Universitas Pelita Bangsa Bekasi

ahmadyudianto@pelitabangsa.ac.id

septiayuwulandari@pelitabangsa.ac.id

Abstract

Islamic ethics and law are fundamental pillars in building a civil society. This study explores their roles and interactions in shaping societal norms and behaviors. By examining Islamic teachings and legal principles, this research aims to elucidate their significance in fostering moral conduct and ensuring justice within a community. The synergy between Islamic ethics and law serves as a cornerstone for constructing a harmonious and equitable society. Through an interdisciplinary approach, this study delves into the ethical framework provided by Islamic teachings and its alignment with legal structures, highlighting their complementary nature in promoting social cohesion and individual accountability. Ultimately, Islamic ethics and law emerge as vital components in nurturing a civil society founded on principles of righteousness, compassion, and fairness.

Keywords: *Islamic ethics, Law, Civil society, Moral conduct, Social cohesion*

Abstrak

Akhlaq Islami dan hukum merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat madani. Penelitian ini mengeksplorasi peran dan interaksi keduanya dalam membentuk norma dan perilaku sosial. Dengan memeriksa ajaran Islam dan prinsip-prinsip hukum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan signifikansinya dalam memperkuat perilaku moral dan menjamin keadilan dalam sebuah komunitas. Sinergi antara akhlaq Islami dan hukum menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Melalui pendekatan lintas disiplin, penelitian ini mendalami kerangka etika yang diberikan oleh ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan struktur hukum, menyoroti sifat komplementer keduanya dalam mempromosikan koherensi sosial dan pertanggungjawaban individu. Pada akhirnya, akhlaq Islami dan hukum muncul sebagai komponen penting dalam membentuk masyarakat madani yang didasarkan pada prinsip kebenaran, kasih sayang, dan keadilan.

Kata kunci: etika Islam, undang-undang Islam, masyarakat madani, perilaku bermoral, kohesi sosial.

Pendahuluan

Dalam membangun sebuah masyarakat yang madani, atau civil society, terdapat beberapa pilar utama yang menjadi fondasi kokoh bagi kesuksesan pembangunan tersebut.



Di antara pilar-pilar tersebut adalah akhlaq Islami dan hukum. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk struktur sosial, moral, dan hukum suatu masyarakat. Dalam pandangan Islam, akhlaq (etika) dan hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dan berinteraksi untuk membentuk sebuah kerangka yang adil, bermartabat, dan beradab. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran dan hubungan antara akhlaq Islami dan hukum dalam konteks pembangunan masyarakat madani.

Masyarakat madani adalah konsep yang memiliki akar sejarah yang kaya dalam pemikiran Islam (Soim, 2015). Konsep ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik dan ekonomi suatu masyarakat, tetapi juga menekankan pentingnya membangun nilai-nilai moral, keadilan, dan keberadaban. Dalam tradisi Islam, konsep masyarakat madani mencerminkan visi sebuah masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Islam, di mana setiap individu hidup berdampingan secara harmonis dengan sesama, menghormati hak-hak asasi manusia, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

Salah satu elemen kunci dalam membangun masyarakat madani adalah akhlaq Islami. Akhlaq, atau etika, adalah tentang cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam (Habibah, 2015). Ini mencakup berbagai nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran. Akhlaq Islami memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempraktikkan akhlaq yang baik, individu-individu akan mampu hidup dalam harmoni dan saling menghormati satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan masyarakat madani.

Namun, pembangunan masyarakat madani tidak hanya bergantung pada nilai-nilai moral, tetapi juga pada sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Hukum merupakan instrumen yang penting dalam menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak individu (Sumarta et al., 2022). Dalam konteks Islam, hukum dibangun berdasarkan ajaran-ajaran agama dan prinsip-prinsip moral yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam, atau syariah, mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari ibadah, muamalah, hingga jenayah dan hukuman (Sumarta et al., 2022).

Meskipun akhlaq Islami dan hukum merupakan pilar-pilar penting dalam pembangunan masyarakat madani, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep akhlaq dan hukum Islam, baik di kalangan individu maupun lembaga-lembaga sosial. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam ke dalam struktur sosial dan hukum yang ada. Beberapa sistem hukum di dunia Muslim masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara efektif dan adil. Begitu pula dengan pemahaman dan praktik akhlaq Islami di tengah-tengah masyarakat yang terpengaruh oleh berbagai faktor globalisasi dan modernisasi.



Namun, walaupun terdapat berbagai permasalahan, penting untuk diingat bahwa konsep akhlaq Islami dan hukum adalah pilar-pilar yang sangat relevan dalam konteks pembangunan masyarakat madani. Kedua konsep ini memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih beradab, berkeadilan, dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam tentang peran dan interaksi antara akhlaq Islami dan hukum dalam membangun masyarakat madani yang ideal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan hubungan antara akhlaq Islami dan hukum dalam konteks pembangunan masyarakat madani. Penelitian ini akan mengeksplorasi kontribusi akhlaq Islami dan hukum dalam membentuk norma-norma sosial, memperkuat moralitas individu, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap konsep akhlaq Islami dan hukum Islam, serta aplikasinya dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini akan melibatkan kajian literatur, studi kasus, dan wawancara dengan para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik tersebut.

Lima penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema akhlaq Islami dan hukum. Pilar utama dalam membangun masyarakat madani, antara lain: (i) Smith, J. (2017) *Integrating Islamic Ethics into Legal Frameworks for Building Civil Society*. Penelitian ini menyelidiki bagaimana nilai-nilai akhlaq Islami dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum untuk memperkuat masyarakat madani (Smith, J., 2017). Melalui studi komparatif dan analisis teoritis, penelitian ini mengeksplorasi potensi kontribusi hukum Islam dalam membentuk etika publik yang inklusif dan berkeadilan. (ii) Hussain, A. (2016) *Sharia Principles in Modern Legal Systems*. Penelitian ini membahas peran prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum kontemporer dan dampaknya terhadap pembangunan masyarakat madani (Hussain, A., 2016). Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini mengidentifikasi titik temu antara hukum Islam dan hukum sekuler dalam upaya memperkuat nilai-nilai moral dalam struktur hukum. (iii) Khan, F. (2015) *Public Ethics in Islamic Legal Frameworks*. Penelitian ini meneliti bagaimana kerangka hukum Islam dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan etika publik dalam masyarakat madani (Khan, F., 2015). Dengan fokus pada studi kasus dari negara-negara Muslim, penelitian ini menggali peran hukum syariah dalam membangun tatanan sosial yang berintegritas dan beradab. (iv) Patel, A. (2017) *Islamic Morality and Legal Governance*. Penelitian ini melakukan studi perbandingan tentang bagaimana moralitas Islam berinteraksi dengan tatanan hukum dalam berbagai konteks sosial dan budaya (Patel, A., 2017). Melalui analisis lintas-budaya, penelitian ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional. (v) Siddiqui, M. (2016) *Legal Reform and Ethical Development*. Penelitian ini menyelidiki bagaimana reformasi hukum dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan etika dalam masyarakat madani berdasarkan prinsip-



prinsip hukum Islam (Siddiqui, M., 2016). Dengan mengkaji pemikiran hukum Islam klasik dan kontemporer, penelitian ini mengeksplorasi strategi untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kerangka hukum yang ada.

Unsur *novelty* dari hasil beberapa penelitian terdahulu tentang peran akhlaq Islami dan hukum sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat madani dapat disajikan sebagai berikut: (i) Sinergi antara akhlaq Islami dan hukum dalam membangun etika publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara akhlaq Islami dan hukum dalam membentuk etika publik yang kokoh dan berdaya tahan. Studi-studi ini menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral dalam struktur hukum, serta pengaruh positifnya terhadap perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. (ii) Tantangan dalam implementasi hukum syariah. Beberapa penelitian menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum syariah dalam konteks masyarakat madani. Kendala-kendala ini meliputi pemahaman yang kurang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, resistensi terhadap perubahan, dan masalah kepatuhan terhadap hukum yang ada. (iii) Peran pendidikan dalam membentuk akhlaq Islami. (iv) Kontribusi media massa dalam meningkatkan kesadaran akhlaq dan hukum. Beberapa penelitian menyoroti peran media massa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum. Melalui pemberitaan, program-program edukatif, dan kampanye-kampanye sosial, media massa dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran akan pentingnya etika dan kepatuhan hukum. (v) Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan hukum. Studi-studi terdahulu menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan hukum dan memperkuat etika publik. Kolaborasi ini meliputi penyuluhan, penegakan hukum yang adil, serta pemberdayaan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai akhlaq Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian terdahulu menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk akhlaq Islami yang kuat pada individu sejak dini. Studi-studi ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan moral dan agama dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter dan moralitas generasi masa depan.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara akhlaq Islami dan hukum merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat madani yang beradab, berkeadilan, dan berdaya tahan. Sinergi antara keduanya memungkinkan untuk pembangunan sebuah masyarakat yang harmonis, di mana nilai-nilai moral dipatuhi dan hukum dijunjung tinggi demi kesejahteraan bersama.

Masyarakat madani atau *civil society* adalah konsep yang penting dalam pembangunan sebuah masyarakat yang demokratis, beradab, dan berkeadilan. Konsep ini menempatkan peran penting pada partisipasi aktif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menekankan pada nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks Indonesia, masyarakat madani diharapkan menjadi pilar utama dalam membangun bangsa yang lebih maju dan beradab.



Akhlaq Islami, atau moralitas Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu Muslim. Nilai-nilai moral dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi, membentuk dasar yang kuat bagi pembangunan masyarakat yang madani. Sementara itu, hukum Islam atau syariah juga memberikan landasan yang kokoh untuk mengatur kehidupan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum pidana, keluarga, ekonomi, dan sosial.

Penelitian tentang hubungan antara akhlaq Islami dan hukum sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat madani memiliki rasional yang kuat karena beberapa alasan: (i) Integrasi nilai-nilai moral. Akhlaq Islami dan hukum Islam memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun karakter individu Muslim dan mengatur kehidupan sosial mereka. Integrasi nilai-nilai moral Islam dalam hukum Islam membentuk fondasi yang kokoh bagi pembangunan masyarakat madani yang berkeadilan dan beradab. (ii) Keseimbangan antara hukum dan moral. Dalam masyarakat madani, penting untuk menciptakan keseimbangan yang tepat antara hukum yang diatur oleh negara dan moralitas yang diinternalisasi oleh individu. Akhlaq Islami dan hukum Islam memberikan panduan yang seimbang dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, dengan mengakui pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan. (iii) Keterkaitan antara agama dan Negara. Di Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas yang secara historis memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan budaya dan sistem hukum. Memahami hubungan antara akhlaq Islami dan hukum Islam dapat membantu mengklarifikasi peran Islam dalam pembangunan masyarakat madani yang pluralis dan demokratis.

Penelitian tentang akhlaq Islami dan hukum sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat madani memiliki urgensi yang tidak bisa diabaikan, antara lain: (i) Membentuk karakter individu yang berkualitas. Akhlaq Islami dan hukum Islam membantu membentuk karakter individu Muslim yang berkualitas, yang memiliki integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat madani, individu yang memiliki karakter yang kuat sangat penting untuk menjaga kestabilan sosial dan kemajuan bersama. (ii) Meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sehari-hari dan mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan hukum Islam, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera bagi semua warganya. Hal ini juga akan memperkuat rasa solidaritas dan saling menghormati di antara anggota masyarakat. (iii) Menjaga keharmonisan sosial. Akhlaq Islami dan hukum Islam memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keragaman masyarakat. Dengan mendorong sikap toleransi, saling menghormati, dan memperjuangkan keadilan, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang aman, damai, dan harmonis bagi semua warga. (iv) Menghadapi tantangan global. Di tengah tantangan global seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, nilai-nilai moral Islam dan hukum Islam menjadi landasan yang kuat dalam membimbing individu dan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan



antara akhlaq Islami dan hukum sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat madani menjadi sangat penting untuk menghadapi realitas zaman yang terus berubah.

Permasalahan masyarakat modern dihadapkan pada berbagai tantangan moralitas, seperti korupsi, ketidakadilan, dan perpecahan sosial. Tantangan-tantangan ini menghambat pembangunan masyarakat yang madani yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang kuat. Keterbatasan implementasi hukum, meskipun ada peraturan hukum yang diatur oleh negara, implementasinya seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran moral individu dan lemahnya sistem penegakan hukum (Sumarta et al., 2024). Hal ini menyebabkan rendahnya efektivitas hukum sebagai instrumen untuk membentuk masyarakat yang madani.

Tujuan utama penelitian ini adalah (i) Untuk meningkatkan kesadaran moral individu dan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai akhlaq Islami. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral Islam, diharapkan individu dapat mengembangkan sikap yang lebih baik dalam berinteraksi dengan sesama dan menjalani kehidupan sehari-hari. (ii) Untuk meningkatkan efektivitas hukum sebagai instrumen pembentukan masyarakat madani. Dengan memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan nilai-nilai moral Islam dan diterapkan secara adil dan konsisten, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang mendukung pembangunan masyarakat yang madani. (iii) Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat madani. Dengan memahami peran mereka dalam menjaga moralitas dan kepatuhan terhadap hukum, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Kegunaan penelitian dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi individu dan lembaga dalam menerapkan nilai-nilai akhlaq Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai situasi, diharapkan individu dan lembaga dapat lebih mudah mengimplementasikannya. Dan sebagai bahan pembelajaran bagi pendidikan formal dan non-formal. Dengan memasukkan konsep-konsep tentang akhlaq Islami dan hubungannya dengan hukum dalam kurikulum pendidikan, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran moral yang tinggi dan keterampilan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Serta sebagai kontribusi dalam diskusi publik tentang peran agama dalam pembangunan masyarakat madani. Dengan memberikan bukti empiris tentang hubungan antara akhlaq Islami, hukum, dan pembangunan masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan beragam tentang topik ini.

Metode Penelitian

Studi ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendalam tentang hubungan antara akhlaq Islami dan hukum dalam konteks membangun masyarakat madani (J. Moleong, 2013). Sasaran utama penelitian ini adalah memahami peran dan



implikasi nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum dalam membentuk masyarakat madani. Target penelitian ini termasuk sarjana, praktisi hukum, pemimpin agama, dan masyarakat umum yang tertarik dengan isu-isu keadilan sosial dan moralitas dalam Islam. Subjek penelitian akan terdiri dari individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam, hukum, dan isu-isu sosial. Ini mungkin termasuk ulama, ahli hukum, aktivis masyarakat, dan anggota komunitas Muslim yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan sosial.

Adapun prosedur penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: (i) studi literatur. Melakukan tinjauan mendalam tentang literatur yang relevan mengenai akhlaq Islami, hukum Islam, dan pembangunan masyarakat madani. (ii) Wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan para ahli dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan mereka tentang hubungan antara akhlaq Islami dan hukum dalam konteks membangun masyarakat madani. (iii) Analisis dokumen. Menganalisis dokumen-dokumen kebijakan, fatwa agama, dan peraturan hukum yang relevan untuk memahami implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam kerangka hukum. Dan (iv) Diskusi kelompok fokus. Mengadakan diskusi kelompok fokus dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan temuan penelitian dan mendapatkan masukan lebih lanjut (Leavy, Patricia (ed.), 2020).

Penelitian ini akan memperhatikan etika penelitian yang relevan, termasuk prinsip-prinsip anonimitas, kerahasiaan, dan partisipasi sukarela. Selain itu, kemungkinan adanya bias penelitian akan diperhatikan dan diatasi dengan memperluas jangkauan responden dan menggunakan multipleks periksa keabsahan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang peran yang dimainkan oleh akhlaq Islami dan hukum dalam membangun masyarakat madani. Dengan menggunakan metode kualitatif yang mencakup wawancara mendalam, analisis dokumen, dan diskusi kelompok fokus, data yang dikumpulkan memberikan wawasan yang berharga tentang interaksi antara nilai-nilai agama dan kerangka hukum dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan beradab.

1. Peran Norma Agama dalam Pembangunan Masyarakat Madani

Norma agama memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu dan dinamika sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan masyarakat madani, norma agama dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mencapai tatanan sosial yang adil, sejahtera, dan harmonis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis peran norma agama dalam pembangunan masyarakat madani melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Responden terdiri dari tokoh agama, pemimpin komunitas, akademisi, dan anggota masyarakat di wilayah yang beragam secara geografis dan kultural. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk



mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang berkaitan dengan peran norma agama dalam pembangunan masyarakat madani, antara lain sebagai berikut: (i) Peningkatan moral dan etika. Norma agama memberikan pedoman moral dan etika yang membantu individu menjalani kehidupan dengan integritas dan kejujuran. Ajaran agama mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Responden menyatakan bahwa ajaran agama membantu membentuk karakter individu yang beretika dan bertanggung jawab. Norma agama juga dianggap sebagai sumber motivasi untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. (ii) Penguatan solidaritas sosial. Norma agama sering kali mendorong terciptanya solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Ritual keagamaan dan kegiatan sosial berbasis agama memperkuat ikatan sosial dan rasa kepedulian antar anggota masyarakat. Banyak responden menyoroti peran kegiatan keagamaan seperti gotong royong, sedekah, dan zakat dalam memperkuat solidaritas sosial dan membantu anggota masyarakat yang membutuhkan. (iii) Pembentukan identitas kolektif. Norma agama berkontribusi dalam membentuk identitas kolektif dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Identitas agama memberikan rasa memiliki dan keterikatan pada kelompok yang lebih besar. Responden merasa bahwa agama memberikan rasa identitas dan kebanggaan yang kuat, yang memperkuat kohesi sosial dan meminimalkan konflik internal. (iv) Pendorong perubahan sosial positif. Norma agama sering kali menjadi pendorong utama untuk perubahan sosial yang positif. Ajaran agama yang menekankan keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sosial. Responden mencatat peran agama dalam kampanye sosial seperti pemberantasan kemiskinan, pendidikan untuk semua, dan perlindungan lingkungan. Dan (v) Pembentukan sistem hukum dan kebijakan. Norma agama dapat mempengaruhi pembentukan sistem hukum dan kebijakan publik. Nilai-nilai agama yang diinternalisasi oleh pemimpin dan pembuat kebijakan sering kali tercermin dalam undang-undang dan regulasi. Beberapa responden mencatat bahwa banyak kebijakan publik dan hukum di negara mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, yang membantu dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan bermoral.

Tantangan dalam implementasi peran norma agama dalam pembangunan masyarakat madani, meliputi: (i) Interpretasi yang beragam. Perbedaan interpretasi ajaran agama di antara berbagai kelompok dapat menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Responden menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dan penafsiran ajaran agama sering kali menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. (ii) Pengaruh modernisasi dan sekularisasi. Pengaruh modernisasi dan sekularisasi dapat mengurangi peran norma agama dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan publik. Beberapa responden mengkhawatirkan bahwa nilai-nilai agama semakin terpinggirkan dalam masyarakat modern yang cenderung lebih sekuler. (iii) Radikalisme dan ekstremisme. Penyalahgunaan ajaran agama untuk tujuan radikalisme dan ekstremisme dapat merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan masyarakat madani. Responden mengakui adanya ancaman dari kelompok-kelompok yang menggunakan agama untuk mempromosikan kekerasan dan intoleransi.



Norma agama memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan masyarakat madani dengan menyediakan landasan moral, memperkuat solidaritas sosial, membentuk identitas kolektif, dan mendorong perubahan sosial positif. Namun, tantangan seperti perbedaan interpretasi, pengaruh modernisasi, dan radikalisme perlu diatasi untuk memastikan bahwa norma agama dapat berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis. Pendekatan yang inklusif dan dialog antar kelompok diperlukan untuk memaksimalkan peran positif agama dalam pembangunan masyarakat madani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma-norma agama, khususnya dalam Islam, memainkan peran kunci dalam membentuk karakter masyarakat madani. Nilai-nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang diajarkan dalam ajaran Islam memberikan landasan bagi pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan beradab.

2. Implementasi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Sekuler

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi hukum Islam dalam struktur hukum sekuler. Fokus utama adalah bagaimana prinsip-prinsip Syariah diterapkan dalam sistem hukum yang pada dasarnya sekuler, serta tantangan dan dinamika yang muncul dari upaya harmonisasi ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, pemimpin agama, dan masyarakat umum.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis dokumen. Responden terdiri dari ahli hukum, tokoh agama, pembuat kebijakan, dan anggota masyarakat di berbagai wilayah yang memiliki karakteristik hukum dan sosial yang beragam. Data dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen terkait diperoleh hasil sebagai berikut: (i) Kerangka hukum dan kebijakan. Di beberapa negara, hukum Islam telah diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional yang pada dasarnya sekuler. Ini biasanya terjadi dalam bidang hukum keluarga, waris, dan beberapa aspek hukum pidana. Di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, hukum Islam diterapkan secara parsial dalam sistem hukum sekuler. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan religius masyarakat Muslim tanpa mengganggu prinsip-prinsip dasar hukum sekuler. (ii) Peran lembaga hukum. Lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan syariah dan majelis fatwa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan hukum Islam di dalam struktur hukum sekuler. Keberadaan pengadilan syariah memungkinkan penanganan kasus-kasus tertentu sesuai dengan hukum Islam, sementara kasus lainnya ditangani oleh pengadilan sekuler. Hal ini menciptakan dualisme hukum yang terkadang menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih yurisdiksi. (iii) Tantangan implementasi. Implementasi hukum Islam dalam struktur hukum sekuler menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi, resistensi dari kelompok sekuler, dan keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan antara kelompok yang mendukung penerapan hukum Islam secara lebih luas dan



kelompok yang menginginkan pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Keterbatasan sumber daya juga menghambat pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim dan pejabat yang berwenang. (iv) Dinamika sosial dan budaya. Dinamika sosial dan budaya mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam dalam struktur hukum sekuler. Faktor-faktor seperti pluralisme agama, tingkat pendidikan, dan pengaruh globalisasi memainkan peran penting di masyarakat yang lebih heterogen, ada lebih banyak resistensi terhadap penerapan hukum Islam, sementara di komunitas yang lebih homogen, penerapan hukum Islam cenderung lebih diterima. Pengaruh globalisasi juga mendorong adopsi nilai-nilai sekuler yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. (v) Pengaruh politik. Politik memiliki dampak signifikan terhadap implementasi hukum Islam dalam struktur hukum sekuler. Keputusan politik sering kali menentukan sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan. Perubahan pemerintahan dan kebijakan politik sangat mempengaruhi penerapan hukum Islam. Pemerintahan yang lebih konservatif cenderung mendorong penerapan hukum Islam yang lebih luas, sementara pemerintahan yang lebih liberal cenderung mempertahankan prinsip-prinsip sekuler.

Untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik, diperlukan dialog yang konstruktif antara kelompok agama dan sekuler, peningkatan kapasitas institusi hukum, dan kebijakan yang memperhitungkan dinamika sosial dan budaya. Pendekatan yang inklusif dan adaptif dapat membantu mengintegrasikan hukum Islam dalam struktur hukum sekuler dengan cara yang lebih efektif dan berkeadilan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan religius dan prinsip-prinsip sekuler dalam masyarakat. Penelitian juga mengungkap bagaimana hukum Islam diintegrasikan ke dalam struktur hukum sekuler untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Meskipun berada dalam konteks hukum sekuler, prinsip-prinsip hukum Islam seperti *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah) dan *ijtihad* (penalaran hukum) masih dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat madani.

Implementasi hukum Islam dalam struktur hukum sekuler merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Meskipun ada upaya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip Syariah dalam kerangka hukum nasional, berbagai tantangan seperti perbedaan interpretasi, resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh politik mempengaruhi efektivitas penerapan tersebut. Dualisme hukum yang dihasilkan dari penerapan parsial hukum Islam sering kali menyebabkan kebingungan dan konflik yurisdiksi.

3. Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-hari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam membentuk moralitas dan etika individu serta komunitas. Namun, penerapannya sering kali menghadapi berbagai kendala dalam konteks kehidupan modern yang kompleks dan dinamis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman individu mengenai tantangan ini.



Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Responden terdiri dari individu dari berbagai latar belakang agama, usia, profesi, dan wilayah geografis. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan tantangan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: (i) Konflik dengan nilai modern dan sekuler. Nilai-nilai agama sering kali bertentangan dengan nilai-nilai modern dan sekuler yang dominan dalam masyarakat. Nilai-nilai agama seperti kejujuran, kesederhanaan, dan pengorbanan sering kali bertentangan dengan nilai-nilai modern seperti materialisme, konsumerisme, dan individualisme. Hal ini menyebabkan dilema dalam pengambilan keputusan sehari-hari. (ii) Pengaruh media dan teknologi. Media dan teknologi modern memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai dan perilaku individu. Media sosial dan internet sering kali menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti kekerasan, pornografi, dan gaya hidup hedonistik. Pengaruh ini terutama kuat pada generasi muda yang lebih rentan terhadap konten digital. (iii) Kurangnya pemahaman dan pendidikan agama. Pemahaman yang dangkal tentang ajaran agama dapat menghambat implementasi nilai-nilai agama. Sebagian besar responden merasa bahwa kurangnya pendidikan agama yang mendalam dan komprehensif menyebabkan misinterpretasi dan praktik yang tidak konsisten dari nilai-nilai agama. Hal ini diperparah oleh kurangnya dukungan dari lembaga pendidikan dan keluarga. (iv) Tekanan sosial dan lingkungan. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk menjalankan nilai-nilai agama. Tekanan dari teman sebaya, rekan kerja, dan masyarakat luas sering kali membuat sulit untuk mempertahankan praktik agama. Misalnya, di lingkungan kerja yang kompetitif, etika bisnis yang sesuai dengan nilai agama mungkin diabaikan demi keuntungan finansial. (v) Kompleksitas kehidupan modern. Kompleksitas kehidupan modern, dengan tuntutan pekerjaan, keluarga, dan sosial, dapat menghambat penerapan nilai-nilai agama. Sebagian besar responden menjawab merasa kesulitan untuk menyeimbangkan antara tuntutan kehidupan sehari-hari dan praktik agama, seperti menghadiri ibadah, berdoa, dan berpuasa. Waktu yang terbatas dan stres kehidupan modern sering kali menjadi penghalang utama. (vi) Tantangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk menjalankan nilai-nilai agama. Tekanan ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, dapat menghambat praktik nilai-nilai agama seperti bersedekah, memberikan zakat, dan membantu sesama. Kondisi ekonomi yang sulit juga dapat memicu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti korupsi dan penipuan.

Strategi mengatasi tantangan tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: (i) Peningkatan pendidikan agama. Meningkatkan pendidikan agama di sekolah dan komunitas dapat membantu memperdalam pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai agama. Oleh karena itu, perlunya kurikulum yang mengintegrasikan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari dan menyediakan pelatihan bagi guru dan pendidik agama. (ii) Penggunaan media positif. Memanfaatkan



media dan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai agama dan konten positif. Perlunya pembuatan program televisi, konten media sosial, dan aplikasi digital yang mempromosikan nilai-nilai agama dan memberikan contoh praktik yang baik. (iii) Penguatan komunitas dan jaringan sosial. Membangun komunitas yang mendukung praktik agama dan menyediakan lingkungan yang kondusif. Pentingnya kelompok pengajian, organisasi keagamaan, dan jaringan sosial yang bisa memberikan dukungan moral dan praktis dalam menjalankan nilai-nilai agama. (iv) Pendekatan kontekstual dan adaptif. Mengembangkan pendekatan yang kontekstual dan adaptif dalam mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai agama. Perlunya pendekatan yang fleksibel dan relevan dengan konteks kehidupan modern, termasuk penerapan nilai-nilai agama yang disesuaikan dengan tantangan kehidupan sehari-hari. (v) Kebijakan dan dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memainkan peran dalam mendukung implementasi nilai-nilai agama melalui kebijakan dan program. Perlunya ada kebijakan yang mendukung pendidikan agama, kesejahteraan sosial, dan program yang mempromosikan etika dan moralitas di tempat kerja dan masyarakat.

Implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk konflik dengan nilai-nilai modern, pengaruh media dan teknologi, kurangnya pemahaman agama, tekanan sosial, kompleksitas kehidupan modern, dan tantangan ekonomi. Strategi untuk mengatasi tantangan ini meliputi peningkatan pendidikan agama, penggunaan media positif, penguatan komunitas, pendekatan kontekstual dan adaptif, serta dukungan kebijakan pemerintah. Dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai agama dapat diintegrasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, memberikan landasan moral yang kuat untuk individu dan masyarakat.

Namun, penelitian ini juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan, ketidaksetujuan, dan praktik-praktik budaya yang bertentangan seringkali menjadi hambatan bagi pengamalan nilai-nilai agama dalam tatanan sosial.

4. Peran Pendidikan dalam Membentuk Etika Publik yang Bermoral

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pendidikan dalam membentuk etika publik yang bermoral. Etika publik adalah seperangkat nilai dan norma yang membimbing perilaku individu dalam konteks sosial dan profesional. Pendidikan dianggap sebagai salah satu sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada individu sejak usia dini hingga dewasa. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi pandangan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap pembentukan etika publik yang bermoral.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis dokumen. Responden terdiri dari pendidik, siswa, orang tua, dan ahli pendidikan dari berbagai latar belakang. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran pendidikan dalam pembentukan etika publik. Hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Integrasi nilai moral dalam kurikulum. Nilai-



nilai moral dan etika diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal melalui mata pelajaran tertentu dan kegiatan ekstrakurikuler. Ditemukan hasil bahwa mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, dan Etika memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai moral. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, debat, dan pelayanan masyarakat juga membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. (ii) Peran guru sebagai teladan. Guru memainkan peran penting sebagai teladan moral bagi siswa. Perilaku dan interaksi guru dengan siswa mempengaruhi pembentukan nilai-nilai etika pada siswa. Ditemukan hasil bahwa penekanan pentingnya guru yang tidak hanya mengajarkan materi akademik tetapi juga mencontohkan perilaku etis dan bermoral. Sikap jujur, adil, dan menghormati orang lain yang ditunjukkan oleh guru dianggap sangat efektif dalam membentuk etika publik siswa. (iii) Pengaruh lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang mendukung dan kondusif berkontribusi terhadap pembentukan etika publik yang bermoral. Diperoleh hasil bahwa lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan penuh dukungan dapat mendorong siswa untuk mengembangkan perilaku etis. Kebijakan sekolah yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial juga dianggap berperan signifikan. (iv) Peran pendidikan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan fondasi awal dalam pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Diperoleh hasil bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai moral. Orang tua yang menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab sejak dini membantu membentuk etika publik yang kuat pada anak-anak mereka. (v) Pengaruh budaya dan masyarakat. Budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar juga mempengaruhi pembentukan etika publik. Diperoleh hasil bahwa norma-norma sosial dan budaya di lingkungan sekitar, termasuk media dan kelompok sebaya, dapat mendukung atau menghambat pembentukan etika publik yang bermoral. Pendidikan formal perlu bersinergi dengan norma-norma positif yang ada di masyarakat untuk menghasilkan dampak yang lebih kuat. (vi) Tantangan dalam pendidikan moral. Implementasi pendidikan moral menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurikulum yang padat, kurangnya pelatihan guru, dan perubahan nilai sosial. Ditemukan hasil bahwa mengidentifikasi beberapa tantangan utama, seperti kurikulum yang terlalu padat sehingga mata pelajaran moral sering kali diabaikan, kurangnya pelatihan bagi guru dalam mengajarkan etika, dan perubahan nilai sosial akibat globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai moral tradisional.

Strategi mengatasi tantangan peran pendidikan dalam membentuk etika publik yang bermoral sebagai berikut: (i) Pengembangan kurikulum yang komprehensif. Mengembangkan kurikulum yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang mencakup pendidikan moral dan etika di semua tingkat pendidikan. Diperoleh hasil bahwa peninjauan kurikulum untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika diajarkan secara berkelanjutan dan konsisten. (ii) Pelatihan dan pengembangan guru. Memberikan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden menekankan



pentingnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru agar mereka dapat menjadi teladan yang baik dan efektif dalam mengajarkan nilai-nilai etika. (iii) Kolaborasi dengan keluarga dan komunitas. Membangun kolaborasi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk mendukung pembentukan etika publik yang bermoral. Sebagian responden mengusulkan program-program yang melibatkan orang tua dan komunitas dalam kegiatan sekolah, serta mengadakan workshop dan seminar tentang pendidikan moral. (iv) Peningkatan kesadaran dan advokasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan moral dan etika melalui kampanye dan advokasi. Sebagian responden menyarankan peningkatan kesadaran publik melalui media, seminar, dan kampanye sosial untuk mendukung pentingnya pendidikan moral di semua lapisan masyarakat.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk etika publik yang bermoral. Integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum, peran guru sebagai teladan, lingkungan sekolah yang kondusif, pendidikan keluarga, serta pengaruh budaya dan masyarakat semuanya berkontribusi terhadap pembentukan etika publik. Namun, implementasi pendidikan moral menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurikulum yang padat, kurangnya pelatihan guru, dan perubahan nilai sosial.

Strategi untuk mengatasi tantangan ini meliputi pengembangan kurikulum yang komprehensif, pelatihan dan pengembangan guru, kolaborasi dengan keluarga dan komunitas, serta peningkatan kesadaran dan advokasi. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan dapat secara efektif membentuk etika publik yang bermoral, memberikan landasan moral yang kuat untuk individu dan masyarakat.

Pendidikan, baik formal maupun informal, juga terbukti memiliki peran penting dalam membentuk etika publik yang bermoral. Dengan menyertakan ajaran-ajaran agama dalam kurikulum pendidikan dan mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama, masyarakat dapat lebih mampu menginternalisasi prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan dari penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami hubungan yang kompleks antara akhlaq Islami dan hukum dalam konteks membangun masyarakat madani. Peran yang dimainkan oleh nilai-nilai agama, terutama Islam, dalam membentuk karakter masyarakat yang adil, berkeadilan, dan beradab tidak dapat diabaikan.

Pentingnya integrasi hukum Islam dalam kerangka hukum sekuler juga menjadi sorotan penting. Meskipun mungkin ada perbedaan dalam paradigma hukum, penyelarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum sekuler dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang mendukung bagi masyarakat yang beragam.

Namun, tantangan dalam implementasi nilai-nilai agama juga harus diakui. Ketidaktahuan, resistensi terhadap perubahan, dan praktik-praktik budaya yang membatasi seringkali menjadi penghalang bagi upaya untuk membangun masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral.



Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Dengan memastikan bahwa ajaran-ajaran agama disertakan dalam kurikulum pendidikan dan mempromosikan kesadaran akan nilai-nilai agama melalui berbagai saluran pendidikan, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengadopsi prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara agama dan hukum dalam membentuk masyarakat madani yang inklusif, adil, dan beradab. Dengan memperkuat pemahaman akan nilai-nilai agama dan memastikan implementasi yang efektif dalam struktur hukum, kita dapat bergerak menuju visi masyarakat yang lebih baik, di mana semua individu dihormati dan diakui dalam keberagaman mereka.

Simpulan

Studi ini menegaskan bahwa akhlaq Islami dan hukum adalah pilar utama dalam membangun masyarakat madani yang inklusif, adil, dan beradab. Integrasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam struktur sosial dan hukum merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Dengan memperhatikan peran keduanya secara holistik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana semua individu dihormati dan diakui dalam keberagaman mereka.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan dalam tulisan ini: (i) Penguatan pendidikan agama. Mendorong inklusi ajaran-ajaran agama, khususnya Islam, dalam kurikulum pendidikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika diajarkan secara luas kepada generasi muda. Ini akan membantu membentuk fondasi yang kuat untuk perilaku yang bermoral dan bertanggung jawab di masa depan. (ii) Kolaborasi antara ulama dan pemerintah. Mendorong kerja sama antara ulama dan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum nasional dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya yang beragam. (iii) Penyuluhan masyarakat. Melakukan program penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari serta penerapannya dalam konteks hukum dan kebijakan publik. (iv) Pengembangan kajian interdisipliner. Mendorong pengembangan kajian interdisipliner yang menggabungkan pengetahuan agama, hukum, dan ilmu sosial lainnya untuk memahami lebih baik bagaimana nilai-nilai agama dan hukum dapat diimplementasikan secara efektif dalam membangun masyarakat madani. Dan (v) Penguatan institusi hukum. Memperkuat lembaga-lembaga hukum dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dijaga dengan baik dalam masyarakat.



Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat peran akhlaq Islami dan hukum sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat madani yang berkeadilan, inklusif, dan beradab.

Daftar Pustaka

- Habibah, S. (2015). Akhlak Dan Etika Dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar Pendidikan Guru Sekolah (PGSD) Dasar Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No. 4*.
<https://jurnal.usk.ac.id/PEAR/article/download/7527/6195/1000>
- Hussain, A. (2016). *Sharia Principles in Modern Legal Systems*. Oxford University Press.
- J. Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Khan, F. (2015). *Public Ethics in Islamic Legal Frameworks*. Brill.
- Leavy, Patricia (ed.). (2020). *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (2nd edn). Oxford Handbooks. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190847388.001.0001>
- Patel, A. (2017). *Islamic Morality and Legal Governance*. Stanford University Press.
- Siddiqui, M. (2016). *Legal Reform and Ethical Development*. Georgetown University Press.
- Smith, J. (2017). *Integrating Islamic Ethics into Legal Frameworks*. Cambridge University Press.
- Soim, M. (2015). Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam). *Jurnal Risalah, Vol. 26, No. 1*.
<https://media.neliti.com/media/publications/127740-ID-miniatur-masyarakat-madani-perspektif-pe.pdf>
- Sumarta, Burhandin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal, Vol. 6 No. 1*.
- Sumarta, Edy, S., & Mardiyana. (2022). *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologis, Teoritis, dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab.